



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
SUB UNIT KERJA : KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADI SURYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **104257**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.045.000.000**

1. Tanah Seluas 120 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/144 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/120 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 60 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 96 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 94 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah Seluas 278 m² di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 695.000.000
8. Tanah Seluas 150 m² di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 997.000.000**

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HARLEY DAVIDSON FLHTCUSE Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000



4. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

| | | |
|--|-----|----------------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 302.402.163 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 1.811.416.280 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | 80.000.000 |
| Sub Total | Rp. | 7.235.818.443 |
| III. HUTANG | Rp. | 333.333.327 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 6.902.485.116 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.